

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA TRANSFER KE DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH SULAMPUA

Muammil Sun'an¹, Aziz Hasyim², Yetty³

^{1,2,3}Faculty of Economy and Business, Khairun University, Indonesia

*Corresponding author: muamil.sunan@unkhair.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 11-07-2026

Received 16-07-2026

Published 17-07-2026

Keywords:

Fiscal Decentralization;
Regional Revenue; Human
Development Index;
SULAMAPUA.

Kata Kunci:

Desentralisasi Fiskal; PAD;
Dana Transfer; Pertumbuhan
Ekonomi; IPM; SULAMAPUA

ABSTRACT

This study contributes to the empirical literature on fiscal decentralization by examining the role of regional fiscal capacity and intergovernmental transfers in driving economic growth and human development in eastern Indonesia, particularly Sulawesi. This study aims to analyze the influence of Original Regional Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on economic growth and the Human Development Index (PJK). This study uses a quantitative approach using panel data from 10 provinces in Sulawesi during 2017–2024. The analysis uses Fixed Effects Model (FEM) estimation with model selection tests, including the Chow, Hausman, and Lagrange Multiplier tests. The results show that PAD and DAK have a positive and significant effect on economic growth and PJK. DBH has a positive effect on economic growth but does not significantly affect PJK, while DAU does not show a significant impact on either indicator. Strengthening regional fiscal capacity and increasing the effectiveness of transfer fund allocation are important strategies to accelerate sustainable development in eastern Indonesia.

ABSTRAK

Studi ini berkontribusi pada literatur empiris tentang desentralisasi fiskal dengan meneliti peran kapasitas fiskal daerah dan transfer antar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah timur Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi. Studi ini bertujuan

untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah Asli (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (PJK). Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data panel dari 10 provinsi di Sulawesi selama tahun 2017–2024. Analisis menggunakan estimasi Model Efek Tetap (FEM) dengan uji pemilihan model, termasuk uji Chow, Hausman, dan Pengali Lagrange. Hasil menunjukkan bahwa PAD dan DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan PJK. DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap PJK, sedangkan DAU tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kedua indikator tersebut. Penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan efektivitas alokasi dana transfer merupakan strategi penting untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia bagian timur.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Sebuah wilayah dianggap berhasil melaksanakan pembangunan jika pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut cukup tinggi. (Lefaan et al., 2026) Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Rachmatulloh et al., 2025) Pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan rakyatnya tidak terlepas dari keberhasilan mengelola pendapatan pengeluaran daerah baik yang bersumber dari daerah itu sendiri maupun dari dana transfer pemerintah pusat melalui APBN secara efektif dan efisien. (Mukhlis et al., 2020)

Kebijakan dana perimbangan ini dilaksanakan karena sumber-sumber utama keuangan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum merata antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. (Sri Rahayu Aprillia et al., 2026) Dana perimbangan diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka menutupi kesenjangan fiskal daerah yang disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pembangunan dengan PADnya. (Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, 2026) Pemerintah kemudian menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana perimbangan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah (Teguh Alfharizqi, 2026).

Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, Kawasan Indonesia Timur (KIT) selalu mendapatkan perhatian dan prioritas tetapi hingga kini pemerataan hasil pembangunan dan kemampuan daerah di kawasan KIT dalam keseluruhan upaya dan hasil masih tertinggal dibandingkan dengan Kawasan Indonesia Barat (KIB) (Maulana & Priyono, 2026). Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terlihat jelas pada aspek keuangan, dimana alokasi dana transfer atau DAU, DAK, DBH yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan jauh lebih tinggi dan pemerintah daerah menjadi kurang memperhatikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaannya. Hal ini berakibat pada peran daerah itu sendiri dalam mendanai belanja daerah serta akan meningkatkan dominannya peran dana transfer (Luthfia, 2026).

Penelitian Ammar Muhammad Zain, (2026) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Umum (DAU) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Siti Rabiyah, Fatahurrazak, 2026); (Pertwi et al., 2026); (Wibowo, 2026); (Nuralam, 2026) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang disebabkan pengalokasian DAU difokuskan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan manusia. Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Qurratunnisa et al., 2026) dan Andriansyah et al., (2026) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif signifikan terhadap IPM yang dikarenakan pengoptimalan DAK untuk membangun infrastruktur serta untuk pembangunan desa yang tertinggal. Dana Bagi Hasil (DBH) dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Januari et al., (2026) dan Imelda & Saputra, Hendra, (2026) menyatakan bahwa DBH berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian, maka peneliti ingin melakukan penelitian yang bertujuan untuk: (1) mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur; (2) mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur; dan (3) mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur.

STUDI LITERATUR

Hubungan Dana Transfer ke Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Anggara, (2026) Transfer Ke Daerah adalah penerimaan daerah dalam bentuk pendapatan transfer yaitu pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari transfer pemerintah atasan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan ini

meliputi: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No 1 Tahun 2022, Dana transfer atau yang kemudian disebut sebagai Transfer ke Daerah (TKD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Kebijakan TKD mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah nasional serta peraturan undang-undang terkait, sejalan dengan rencana kerja pemerintah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Transfer Ke Daerah merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (Arifin & Rosalia, 2025)

Dana transfer atau dana perimbangan pada dasarnya adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang kemudian dialokasikan ke tiap-tiap daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana transfer atau perimbangan terdiri dari dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan kekayaan daerah, dana alokasi umum yang merupakan komponen terbesar dalam menciptakan pemerataan dan keadilan antar dan dana alokasi khusus yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sisilia & Harsono (2021) menyatakan bahwa salah satu komponen dana perimbangan yakni DAU berguna dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur di setiap daerah sehingga diharapkan terjadinya pemerataan pertumbuhan di daerah. Menurut Hastuty et al., (2026), secara teori komponen dana perimbangan lain berupa DAK, ditujukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna membiayai belanja pemerintah daerah yang bersifat khusus, seperti belanja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, prasarana pemerintahan, kelautan dan perikanan serta lingkungan hidup. Adapun tujuan alokasi belanja tersebut ialah meminimalkan ketidakmerataan infrastruktur publik antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Hubungan Dana Transfer ke Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, teori mengenai kesejahteraan dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) macam, yakni *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. (Priyatno et al., 2026) Pendekatan *classical utilitarian* menekankan bahwa kesenangan atau kepuasan seseorang dapat diukur dan bertambah. Prinsip bagi individu adalah meningkatkan sebanyak mungkin Tingkat kesejahteraannya, sedangkan bagi masyarakat peningkatan kesejahteraan kelompoknya merupakan prinsip yang dipegang dalam kehidupannya. Pendekatan *neoclassical welfare theory* menjelaskan bahwa fungsi kesejahteraan merupakan fungsi dari semua kepuasan individu. Perkembangan lainnya dalam teori kesejahteraan sosial adalah munculnya *new contractarian approach* yang mengangkat adanya kebebasan maksimum dalam hidup individu atau seseorang.

Tujuan utama kebijakan desentralisasi di satu pihak adalah untuk mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di pihak lain dengan mendesentralisasikan kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang

signifikan. Menurut Arifin & Rosalia, (2025) terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi suatu wilayah, yang pertama adalah teori basis ekonomi, teori ini menyatakan bahwa factor penentu utama pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah berkaitan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar wilayah. Proses produksi dari industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya produksi lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku dan hasilnya diekspor dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita melalui penciptaan lapangan kerja di daerah tersebut. Teori kedua yakni teori kedaerahan, teori ini sering digunakan untuk daerah perbelanjaan atau pengembangan yang dianggap paling tepat di suatu daerah.

Seorang ekonom Jerman, Adolf Wagner mengemukakan teori yang lebih dikenal dengan Hukum Wagner. Dalam Hukum Wager, dinyatakan bahwa ukuran pemerintah akan sejalan dengan pembangunan yang dilakukan. Konsep yang sering disebut "hukum peningkatan aktivitas pemerintah" menitikberatkan pada ekspansi yang terjadi secara absolut maupun relatif dari sektor publik (termasuk pemerintah pusat maupun daerah serta perusahaan publik) sebagai dampak pertumbuhan pada sektor swasta (Sangadji et al., 2026). Berlandaskan dari Hukum Wagner mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, diduga bahwa belanja pemerintah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer atau Dana Perimbangan dapat merefleksikan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan erat hubungannya dengan peningkatan derajat hidup atau kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga demikian, diharapkan semakin tinggi pengeluaran pemerintah dengan meningkatnya PAD dan Dana Transfer, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data panel yang mencakup 10 provinsi di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua selama periode 2017-2024. Wilayah penelitian terdiri atas Koridor Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo), Koridor Maluku (Maluku dan Maluku Utara), serta Koridor Papua (Papua dan Papua Barat) dan tidak termasuk 4 provinsi baru di wilayah Papua hasil pemekaran yang disahkan pada tahun 2022, Provinsi baru tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kerana keterbatasan data keempat provinsi ini tidak dimasukan dalam penelitian ini.

Variabel penelitian ini meliputi Pertumbuhan Ekonomi perkembangan produk domestik regional bruto (PDRB), variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), variable Dana Alokasi Umum (DAU), variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan variable Dana Bagi Hasil (DBH)

Model Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2017-2024, bersumber dari website Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel cross section maupun time series, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah omitted variable atau mengabaikan variabel yang relevan (Gujarati, 2012). Model penelitian yang digunakan, yaitu model Pertumbuhan Ekonomi dan model indeks Pembangunan manusia. Model pertama merujuk pada model penelitian dari. Model kedua berasal dari. Kedua model kemudian disesuaikan atau dimodifikasi agar searah dengan tujuan penelitian. Adapun model pertama dispesifikasi sebagai berikut:

$$\text{LnPE}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{LnPAD}_{it} + \alpha_2 \text{LnDAU}_{it} + \alpha_3 \text{LnDAK}_{it} + \alpha_4 \text{LnDBH}_{it} + e_{it} \dots \dots \dots (3.1)$$

$$\text{LnIPM}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPAD}_{it} + \beta_2 \text{LnDAU}_{it} + \beta_3 \text{LnDAK}_{it} + \beta_4 \text{LnDBH}_{it} + \beta_5 \text{LnPE}_{it} + e_{it} \dots (3.2)$$

Keterangan:

1. PE = Pertumbuhan Ekonomi
2. IPM = Indeks Pembangunan Manusia
3. PAD = Pendapatan Asli Daerah
4. DAU = Dana Alokasi Umum
5. DAK = Dana Alokasi Khusus
6. DBH = Dana Bagi Hasil
7. $\alpha \beta$ = konstanta
8. $\alpha_1 - \alpha_4$ = koefisien regresi
9. $\beta_1 - \beta_5$ = koefisien regresi
10. e = error

Prosedur Estimasi dan Tes Diagnostik

Penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel untuk menganalisis hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, kapasitas fiskal, dan kualitas sumber daya manusia. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui serangkaian uji spesifikasi model, yaitu Chow test, Hausman test, dan Lagrange Multiplier (LM) test untuk menentukan model yang paling sesuai antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), atau Random Effect Model (REM). Selanjutnya, dilakukan pengujian diagnostik untuk memastikan validitas model yang meliputi uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran asumsi klasik, terutama heteroskedastisitas dan autokorelasi, estimasi dilakukan menggunakan robust standard errors (White cross-section) untuk memperoleh standar error yang lebih konsisten dan menghasilkan estimasi yang lebih reliabel (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2013).

Tabel 1. Definisi Variabel, Satuan dan Sumber Data Penelitian

No	Variabel	Simbol	Satuan	sumber
1	Pertumbuhan Ekonomi	LnPE_{it}	Persen	BPS

2	Indeks Pembangunan Manusia	LnIPM _{it}	persen	BPS
3	Pendapatan Asli Daerah	LnPAD _{it}	Miliar Rupiah	DJPK
4	Dana Alokasi Umum	LnDAU _{it}	Miliar Rupiah	DJPK
5	Dana Alokasi Khusus	LnDAK _{it}	Miliar Rupiah	DJPK
6	Dana Bagi Hasil	LnDBH _{it}	Miliar Rupiah	DJPK

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan BPS dan Kementerian keuangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian model data panel pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak Eviews. Langkah awal dalam analisis pemilihan model data panel yaitu dilakukan estimasi data panel dengan pendekatan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). (Johan, 2021)

Tabel 2. Hasil Uji Data Panel Model

Jenis Uji	Model Panel		
Uji Chow	F-Statistic	Prob.	Model Terpilih
Cross-section F	99.037942	0.0000*	FEM
Uji Hausman	Chi-Sq. Statistic	Prob.	Model Terpilih
Cross-section random	74.772121	0.0000*	FEM
Uji langrange multiplier (LM)	Chi-Sq. Statistic	Prob.	Model Terpilih
Cross-sectionrandom	84.16760	0.0000*	REM

Keterangan: *) Nilai Prob > 0,05

Berdasarkan hasil Uji Chow pada Tabel 1. nilai probabilitas cross-section F lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0000 < 0,05$. Interpretasi hasil Uji Chow model terpilih adalah fixed effect model (FEM). Hasil Uji Hausman pada Tabel 1. menunjukkan nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0000 < 0,05$, Berdasarkan hasil Uji Hausman maka diperoleh bahwa fixed effect model (FEM) lebih baik jika dibandingkan dengan random effect model, FEM terpilih. Hasil uji *Langrange Multiplier* (LM) pada Tabel 1. menunjukkan nilai probabilitas cross-section random lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,0000 < 0,05$, berdasarkan hasil uji *Langrange Multiplier* (LM) maka diperoleh bahwa random effect model lebih baik jika dibandingkan dengan common effect model. Walaupun LM test menunjukkan REM dibanding CEM, hasil Hausman menunjukkan bahwa FEM lebih sesuai dibanding REM sehingga model akhir yang digunakan adalah FEM.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik penting untuk memastikan kelayakan model regresi sebelum penarikan kesimpulan. Pada model panel data yang digunakan, yaitu Fixed Effect Model (FEM), dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Jika ditemukan pelanggaran, dapat diterapkan koreksi seperti transformasi data, robust standard errors, atau model alternatif.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	PAD	DAU	DAK	DBH	PE
PAD	1.000000	0.291804	-0.041929	-0.161366	-0.155797
DAU	0.291804	1.000000	-0.001718	0.288398	0.062176
DAK	-0.041929	-0.001718	1.000000	0.072512	0.224886
DBH	-0.161366	0.288398	0.072512	1.000000	0.056314
PE	-0.155797	0.062176	0.224886	0.056314	1.000000

Sumber: Pengolahan data Eviews (2025) sig. <0,85

Hasil uji Multikolinearitas pada tabel 3 menjelaskan Koefisien kolerasi variabel PAD dan DAU sebesar $0.291804 < 0,85$, Koefisien kolerasi PAD dan DAK sebesar $-0.041929 < 0,85$ dan koefisien kolerasi PAD dan DBH sebesar $-0.161366 < 0,85$ dan koefisien kolerasi PAD dan PE sebesar $-0.155797 < 0,85$ dan koefisien kolerasi PE dan DBH sebesar $0.056314 < 0,85$ Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas dari multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

<i>Panel Period Heteroskedasticity LR Test</i>			
Model persamaan Pertumbuhan Ekonomi dan IPM			
Likelihood Ratio	Value	df	Probability
	8.631731	10	0.1049

Signifikan ($>0,05$). Sumber: diolah (Eviews)

Hasil Uji LR Heteroskedastisitas Periode Panel menunjukkan nilai probabilitas 0,1049 ($>0,05$), sehingga H_0 diterima. Ini menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas periode panel, artinya varians residual relatif stabil dari waktu ke waktu. Dengan demikian, tidak ada indikasi perubahan sistematis dalam varians kesalahan dalam periode penelitian. Meskipun demikian, estimasi masih dilakukan menggunakan kesalahan standar robust (White cross-section) untuk mengatasi potensi autokorelasi dan memastikan inferensi statistik yang lebih konsisten dan andal

Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis pertama dengan menggunakan model *Fixed Effect Model* (FEM) yang ingin menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer ke daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur. Hasil pengujian ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) Pertumbuhan Ekonomi

Variable	Coefficient	Prob.	
Konstanta	-4.989768	0.0509	keterangan
LnPADit	0.250259	0.0284	Signifikan positif (**)
LnDAUit	0.036039	0.6075	Tidak signifikan
LnDAKit	0.100851	0.0014	Signifikan positif (***)
LnDBHit	0.075076	0.0800	Signifikan positif (*)
Effects Specification: Fixed Effect Model (FEM)			
Adjusted R-squared	0.976870		
F-statistic	250.8861		
Prob(F-statistic)	0.000000		
Durbin-Watson stat	1.159316		

*Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **signifikan pada $\alpha = 5\%$; ***signifikan pada $\alpha = 1\%$. Sumber: diolah (Eviews)

Hasil estimasi *Fixed Effect Model* menunjukkan bahwa PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah SULAMAPUA. Koefisien LnPAD sebesar 0,250259 menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,25%, ceteris paribus. Sementara itu, DAU tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0,976870 menunjukkan bahwa sebesar 97,68% variasi pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam model. Selanjutnya, hipotesis kedua yang ingin melihat pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer pusat ke daerah terhadap Pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur ditunjukkan pada tabel berikut.

**Tabel 6. Hasil Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM)
Indeks Pembangunan Manusia**

Variable	Coefficient	Prob.	
Konstanta	-17.87331	0.2928	Keterangan
LnPADit	3.251425	0.0001	Signifikan positif (***)
LnDAUit	0.079525	0.8660	Tidak signifikan
LnDAKit	0.824944	0.0001	Signifikan positif (***)
LnDBHit	0.040885	0.8858	Tidak signifikan
Effects Specification: Fixed Effect Model (FEM)			
Adjusted R-squared	0.958048		
F-statistic	136.1181		
Prob(F-statistic)	0.000000		

Durbin-Watson stat	1.518231
--------------------	----------

*Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **signifikan pada $\alpha = 5\%$; ***signifikan pada $\alpha = 1\%$. Sumber: diolah (Eviews)

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia wilayah SULAMAPUA. Koefisien LnPAD sebesar 3.251425 menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan indeks Pembangunan manusia sebesar 3,25%, Koefisien LnDAK sebesar 0.824944 menunjukkan bahwa peningkatan pada DAK sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,82%. Sementara itu, DAU dan DBH tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara statistik terhadap IPM. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.958048 menunjukkan bahwa sebesar 95,80% variasi indeks Pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH dalam model. Hipotesis ketiga yang ingin melihat pengaruh pendapatan asli daerah, dana transfer pusat ke daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur ditunjukkan pada tabel berikut

**Tabel 7. Hasil Pengujian Fixed Effect Model (FEM)
Indeks Pembangunan Manusia**

Variable	Coefficient	Prob.	
Konstanta	1.888987	0.8945	Keterangan
LnPADit	2.260259	0.0008*	Signifikan positif (***)
LnDAUit	-0.063209	0.8697	Tidak signifikan
LnDAKit	0.425519	0.0216*	Signifikan positif (**)
LnDBHit	-0.256458	0.2841	Tidak signifikan
LnPEit	3.960564	0.0000*	Signifikan positif (***)
Effects Specification: Fixed Effect Model (FEM)			
Adjusted R-squared	0.972121		
F-statistic	191.4399		
Prob(F-statistic)	0.000000		
Durbin-Watson stat	0.980917		

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 10\%$; **signifikan pada $\alpha = 5\%$; ***signifikan pada $\alpha = 1\%$. Sumber: diolah (Eviews)

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PAD, DAK dan PE berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks Pembangunan manusia wilayah SULAMAPUA. Koefisien LnPAD sebesar 2.260259 menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 1% akan meningkatkan indeks Pembangunan manusia sebesar 2,26%, Koefisien LnDAK sebesar 0.425519 menunjukkan bahwa peningkatan pada DAK sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 0,42% dan Koefisien LnPE sebesar 3.960564 menunjukkan bahwa peningkatan pada pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan IPM sebesar 3,96% Sementara itu, DAU dan DBH tidak menunjukkan

pengaruh signifikan secara statistik terhadap IPM. Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.972121 menunjukkan bahwa sebesar 97,21% variasi indeks Pembangunan manusia dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, DAK, DBH dan PE dalam model.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah Indonesia Timur. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD telah mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan, baik melalui peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, maupun program sosial ekonomi masyarakat. (Ammar Muhammad Zain, 2026) maka dari itu, semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Secara teoritis, peningkatan PAD dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Pendapatan daerah, terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi, memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas publik, meningkatkan pelayanan masyarakat, serta mendorong aktivitas ekonomi. (Pertiwi et al., 2026) Hal ini sejalan dengan penelitian Susani & Hanifa, (2026) dan (Wibowo, 2026) yang menyatakan bahwa peningkatan penerimaan daerah akan memengaruhi pengeluaran pemerintah daerah dan selanjutnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh PAD terhadap IPM menunjukkan bahwa penerimaan daerah yang meningkat dapat mendukung pembiayaan sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar lainnya. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan PAD secara efektif akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin melalui peningkatan indikator pembangunan manusia. (Nuralam, 2026) Hal ini sesuai dengan pandangan (Nor et al., 2026) yang menyatakan bahwa semakin besar penerimaan daerah, maka semakin besar kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sri Rahayu Aprillia et al., (2026); Eka Saputera dan Pandoyo (2020) yang menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Sisilia dan Harsono (2021) juga menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DAU memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Lebih lanjut, Teguh Alfharizqi, (2026) menjelaskan bahwa peningkatan PAD dapat mendorong pembangunan daerah melalui peningkatan belanja publik dan penyediaan fasilitas infrastruktur yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Berdasarkan hasil temuan, dapat dijelaskan bahwa PAD memiliki peran strategis dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus

menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu instrumen desentralisasi fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan fiskal antarwilayah serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Anggara, 2026) Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), variabel DAU memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah SULAMAPUA. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara statistik pengaruhnya belum cukup kuat. Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui konsep desentralisasi fiskal Oates (1972) yang menyatakan bahwa transfer fiskal dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik apabila pemerintah daerah mampu mengalokasikan dana sesuai kebutuhan masyarakat. (Pertiwi et al., 2026) Namun, besarnya transfer fiskal belum secara otomatis menghasilkan pertumbuhan ekonomi apabila penggunaannya masih dominan untuk belanja operasional dibandingkan belanja produktif yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi. (Sangadji et al., 2026)

Tidak signifikannya pengaruh DAU terhadap pertumbuhan ekonomi mengindikasikan bahwa efektivitas pemanfaatan transfer umum masih menjadi tantangan di wilayah Indonesia Timur. DAU yang bersifat block grant memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah dalam menentukan prioritas belanja, tetapi fleksibilitas tersebut dapat menyebabkan dampak ekonomi yang berbeda antarwilayah. (Inayah, 2026) Apabila DAU lebih banyak dialokasikan untuk belanja pegawai dan kebutuhan rutin pemerintahan, maka kontribusinya terhadap peningkatan investasi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi menjadi terbatas. (Khasanah & Hutabarat, 2026) Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa temuan empiris yang menunjukkan bahwa DAU tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena besarnya dana transfer belum mencerminkan kualitas pengelolaan fiskal daerah. (Prasapawidya et al., 2025); (Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, 2026) Dengan demikian, peningkatan DAU perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola anggaran agar mampu mendorong aktivitas ekonomi yang lebih produktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan DAU belum mampu secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan manusia di wilayah SULAMAPUA. (Salim, 2026) Secara teoritis, transfer fiskal seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. (Prasapawidya et al., 2025) Namun, dampak terhadap IPM membutuhkan proses jangka panjang karena pembangunan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran, tetapi juga kualitas implementasi program dan efektivitas

belanja publik. (Siti Rabiyyah, Fatahurrazak, 2026) Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa DAU belum memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM ketika pengelolaan transfer belum diarahkan secara optimal pada sektor pembangunan manusia. (Hastuty et al., 2026) Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran agar DAU tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks Pembangunan manusia di wilayah Indonesia timur. Artinya bahwa, jika semakin meningkat dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat ke daerah maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan indeks Pembangunan manusia. (Maulana & Priyono, 2026) Pemberian DAU kepada pemerintah daerah merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Siti Rabiyyah, Fatahurrazak, 2026) Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan DAU apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sehingga akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas pendidikan dan standard kehidupan masyarakat sehingga akan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). (Srasa Saswatata; 2022).

Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. (Sri Rahayu Aprillia et al., 2026) Dengan DAK, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Maulida et al., 2022). Semakin besar jumlah DAK yang diterima daerah, maka daerah dapat melakukan pembangunan jangka panjang yang lebih baik lagi sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini sesuai teori transfer conditional grant yaitu transfer dengan syarat dan sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Sri Ayu Ningsi, (2026), Mokorowu (2020), dan Siti Rabiyyah, Fatahurrazak, (2026) yang menyatakan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Maemona & Choerudin, (2026) dengan hasil pengujiannya yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun, tidak sejalan dengan Anggara, (2026) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian tentang

pengaruh DAK terhadap IPM oleh Suhyanto *et al.* (2020) memperoleh simpulan bahwa semua dana transfer termasuk DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. Sedangkan, penelitian Sembiring (2020) menghasilkan simpulan bahwa DAK Fisik tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Berbeda dengan Srikandi M. Gafur, Cicilia A. Tungga, (2023) yang menyatakan bahwa pengelolaan DAK belum berorientasi ke anggaran berbasis kinerja sehingga belum efektif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu negara yang menunjukkan sejauh mana akan menuju keadaan yang lebih baik selama periode waktu tertentu. Setiap daerah dituntut untuk mampu menggali sumber pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya. (Teguh Alfharizqi, 2026) Pada akhirnya sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. (Sri Rahayu Aprillia et al., 2026) Dana Bagi Hasil bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. (Luthfia, 2026)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia di wilayah Indonesia Timur. Hal ini mengandung makna bahwa dana bagi hasil yang merupakan dana transfer belum cukup mampu mendanai kebutuhan daerah untuk pelaksanaan desentralisasi, yang disebabkan hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. (Arifin & Rosalia, 2025) Dana bagi hasil merupakan dana perimbangan yang sifatnya *block grants* sama seperti dana alokasi umum yang penggunaan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah, tetapi ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat. (Putu et al., 2026) Sehingga pemerintah daerah tidak leluasa dalam hal penggunaan DBH untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitiannya Handayani (2020) yang menyimpulkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap indeks Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, sesuai kajian empiris yang dilakukan oleh Mokorowu (2020), Inayah, (2026); Pertiwi et al., (2026) menyatakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. (Ashari et al., 2026) menemukan bahwa DBH tidak memiliki dampak atau pengaruh terhadap variable IPM. Dikarenakan penyelenggaraan dan pemanfaatan DBH adalah

kewenangan pemerintah daerah, di sisi lain DBH tidak semuanya diserahkan kepada daerah yang dikarenakan ada beberapa bagian DBH yang masih di atur oleh pemerintah pusat.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah mencerminkan prestasi suatu daerah dalam mengendalikan kegiatan perekonomiannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah, salah satunya didukung oleh kualitas modal manusia. Adanya modal manusia yang berkualitas diyakini memberikan pengaruh yang baik pula terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. (Hukma Ratu Purnama, Syamsu Nujum, Fadhila Ratu Pratiwi, 2026) Untuk mengetahui kualitas modal manusia, *United Nation Development Programme* (UNDP), telah menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang dibentuk berdasarkan tiga indikator yaitu 1). lamanya hidup, 2). Tingkat pendidikan, 3) tingkat kehidupan yang layak (Utami FP, 2020).

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks Pembangunan manusia di Wilayah Indonesia Timur. Artinya bahwa, jika terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan mendorong kenaikan indeks Pembangunan manusia (Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, 2026). Peningkatan kualitas manusia yang tercermin dari IPM pada suatu wilayah atau daerah melalui pembangunan manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan di wilayahnya.

Secara spesifik, peningkatan IPM ini mencerminkan kemajuan pada dimensi kesehatan, akses pendidikan, serta standar hidup layak yang secara kolektif memicu produktivitas penduduk lebih tinggi. (Mentari et al., 2026) Fenomena ini mengindikasikan adanya *trickledown effect* dari aktivitas ekonomi produktif yang dialokasikan oleh rumah tangga dan pemerintah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, seperti layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. (Nor et al., 2026) Lebih lanjut, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui investasi sosial ini secara simultan menjadi katalisator dalam menurunkan angka kemiskinan serta menciptakan redistribusi pendapatan yang lebih merata di suatu wilayah (Inayah, 2026).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah dan transfer pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia di wilayah SULAMAPUA. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi belum mampu meningkatkan IPM secara signifikan, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kedua indikator pembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kemandirian fiskal daerah

dan peningkatan efektivitas pemanfaatan dana transfer perlu menjadi prioritas kebijakan untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur. Saran Penelitian Pemerintah daerah perlu memaksimalkan sumber-sumber potensi penerimaan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan sektor pajak dan retibusi daerah serta sumber penerimaan lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan pendapatan asli daerah secara efektif dan optimal sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia timur. Tranfer ke daerah berupa dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil yang disebabkan keterbatasan pendapatan daerah, perlu dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar Muhammad Zain, H. W. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022–2024. *Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 8(2), 651–662. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i2.10715>
- Andriansyah, G., Sabriana, O., & Al-maida, S. (2026). ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN KOTA DI-NTB [*Analysis of Regional Taxes and Transfer Revenues on The Human Development Index of Districts and Cities in NTB*]. 71–81.
- Anggara, B. (2026). DAMPAK INSTRUMEN FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI PANEL DATA DI PROVINSI LAMPUNG. 22, 325–339.
- Arifin, M., & Rosalia, F. (2025). FISCAL DECENTRALIZATION OF EAST LAMPUNG REGENCY 2020 – 2024 STUDY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL PERFORMANCE. 14(4), 4794–4805.
- Ashari, I., Tama, T. A., Hastuti, D., & Komarlina, L. (2026). Connection fiscal decentralization and poverty in South Sulawesi : Analysis of the 2004 – 2024 period. 6(2).
- Azizah, A., Sirojuzilam, S., & Amalia Fachrudin, K. (2022). Analysis of the Effect of Regional Original Income and Fund Transfers on City Government Economic Growth in North Sumatra Province. *International Journal of Science, Technology & Management*, 3(4).
- Eka Saputera, Andri Gustaf & Pandoyo, (2020). Pengaruh DAU, PAD, DAK Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Pada Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekbank* Volume 3 Nomor 2 Desember 2020.
- Handayani, Hesti. (2020), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 4-18.

- Hastuty, S. C., Hayati, M., & Ermawati, L. (2026). *The Influence of Government Expenditure on Education , Health and Poverty Sectors on Indonesia ' s Human Development Index in 2019-2023 an Islamic Economics Perspective*. 14(1), 47-58.
- Hukma Ratu Purnama, Syamsu Nujum, Fadhila Ratu Pratiwi, A. R. R. (2026). *Ketika Pendidikan dan PDRB Gagal Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah : Bukti Empiris dari Provinsi Sulawesi Selatan*. 9(1), 192-203.
- Imelda, & Saputra, Hendra, P. R. R. (2026). *BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI)*. 288-296.
- Inayah, Z. (2026). *COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIAL AUTONOMY FUND UTILIZATION : EVIDENCE FROM ACEH AND PAPUA*. 3(1), 1-13.
- Januari, N., Nugraha, D. A., Agung, I. G., & Apsari, A. (2026). *Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Bali Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dapat dilihat pada Provinsi Bali . Meskipun secara umum Provinsi Bali menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif , namun kenyataan di lapangan memperlihatkan adanya ketimpangan antar*. (November 2025).
- Johan, S. (2021). *Determinants of Banking Industry Profitability: an Empirical Research of Indonesia Financial Institutions*. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(2), 244-262. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i2.4666>
- Khasanaha, D. A., & Hutabarat, R. E. (2026). *The Effect of Local Taxes, Capital Expenditure, and GRDP on Regency/City Revenue in East Java Province*. *Jurnal Ilmu Ekonomi (Jie)*, 5(2), 247-261.
- Lefaan, Y., Hartiningsih, E., Ary, J., & Liga, M. (2026). *Unlocking Development in Papua : The Reciprocal Relationship between Economic Growth and HDI Under Special Autonomy*. 21(1), 1-19.
- Luthfia, A. R. (2026). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Era Desentralisasi*. 3(1), 43-51.
- Maemona, D., & Choerudin, A. (2026). *Pengaruh Efektivitas , Efisiensi , Kualitas Perencanaan Anggaran (DAK) terhadap Kinerja Keuangan DPPKBP3A Wonogiri*. 5(1), 1775-1782.
- Mafahir, A., & Soelistiyo, A. (2017). *Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap PDRB Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ilmu Ekionomi JIE*, 1(2), 143-152.
- Marthen Anthon Pentury, Alimin Suli, S. (2026). *Path Analysis : The Influence of PAD and TKD on Economic Growth Through Regional Expenditure in The Regency Fakfak, West Papua Province, 2015-2024*. 5(1), 2015-2024.

- Maulana, M. S., & Priyono, J. (2026). *The Effect of the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH) on the Human Development Index (HDI) in Surabaya City*. 3(3), 1-10.
- Maulida, Y., Abdul Hamid, & Hasibuan, F. U. (2022). Pengaruh Investasi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1), 21-38. <https://doi.org/10.32505/jim.v4i1.3897>
- Mentari, N., Ampa, A. T., Ihwal, M., Yahya, I., & Arisona, D. C. (2026). *Pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR) pada Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Papua*. 3(1), 1-12.
- Mokorowu, L. A. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, volume 21 (04). DOI: doi.org/10.35794/jpek.32839.21.4.2020.
- Mukhlis, I., Hidayah, I., & Retnasih, N. R. (2020). Interest Rate Volatility of the Federal Funds Rate: Response of the Bank Indonesia and its Impact on the Indonesian Economic Stability. *Journal of Central Banking Theory and Practice*, 9(1), 111-133. <https://doi.org/10.2478/jcbtp-2020-0007>
- Nor, B., Martodiryo, S., Fadhilah, A., Harahap, H., Azzahra, T., & Bella, S. (2026). *Development In Figures: Human Development Index of Tabalong Regency 2010-2024*. 5(1), 70-74.
- Nuralam. (2026). *Dampak Pendapatan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development)*. faktor-f. 7(2), 1104-1123.
- Pertiwi, H., Yenni, M. I., & Rusmini, A. (2026). Desentralisasi Fiskal sebagai Instrumen Otonomi Daerah di Indonesia : Systematic Literature Review. *Department of Digital Business Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(4), 10365-10371.
- Prasapawidya, F., Hardiningsih, P., Lutfi, M., & Kurniawan, A. (2025). *The Role of Fiscal Decentralization on Inequality: Evidence from Papua Province*. 5(1), 61-72. <https://doi.org/10.1298/jampe.v3i2.14475>
- Priyatno, P. D., Yetti, F., & Laili, S. N. (2026). Sharia-Based Human Development in Realizing Equitable Welfare in Banten Province. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 20(1), 399. <https://doi.org/10.35931/aq.v20i1.5699>
- Putu, N., Ningtyas, K., Ngurah, I. G., & Widiatedja, P. (2026). *Harmonization of the Authority of the Central and Regional Governments in State Financial Management as an Implementation of Regional Autonomy*. 69-74.

- Qurratunnisa, R., Dewi, F. G., & Nauli, P. (2026). Reviewing the Evidence: How Key Fiscal Instruments Associated with Opportunistic Behavior? *Journal of Global Economics, Management and Business Research*, 18(1), 12-22.
<https://doi.org/10.56557/jgembr/2026/v18i110076>
- Rachmatulloh, B., Herdiana, B. N. D., Fitriyah, & Retnasih, N. R. (2025). The Influence of Digital Trust and Artificial Intelligence Literacy on Business Sustainability: The Mediating Role of Innovation Capability. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, 25(10), 484-501.
<https://doi.org/10.9734/ajeba/2025/v25i102030>
- Rizal, Y. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomika*, volume 5 (1).
<https://ejurnalunsam.id/index.php/jse>.
- Salim, A. E. (2026). *Dampak Investasi Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Makassar : Analisis Makroekonomi dan Implikasi Kebijakan*. 1-11.
- Sangadji, M. F., Ismail, M., Khusaini, M., & Prasetyia, F. (2026). The Effect of Central Government Transfer Funds on Poverty Levels in Maluku Province. *International Journal of Accounting and Economics Studies*, 13, 290-296.
- Sembiring, T. A. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) fisik terhadap pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016 - 2018). *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(1), 77-92.
- Sisilia, Maria & Harsono, 2021. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019*. *Journal of Regional Economics Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2021 : 57-70.
- Siti Rabiyyah, Fatahurrazak, H. L. R. (2026). ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA KABUPATEN DAN KOTA DI KEPULAUAN RIAU TAHUN. 3(2), 52-71.
- Srasa Saswatata, Satmaka. 2022. Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Semarang. *Serat Acitya - Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang* ISSN : 2302-2752, E-ISSN: 2722-0494 Vol.3 No.1, 2022.
- Sri Ayu Ningsi, I. L. (2026). *Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia 2015-2024*. 8(3), 1256-1261.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v8i3.10909>

- Sri Rahayu Aprillia, Citra Uli Situmorang, Puti Andiny, & Safuridar. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Langsa. *Wawasan : Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 4(1), 102-127. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v4i1.4068>
- Srikandi M. Gafur, Cicilia A. Tungga, A. M. (2023). TERHADAP AKSES PENDIDIKAN DAN KESEHATAN PADA KABUPATEN DI PROVINSI NTT TAHUN 2019-. 157-169.
- Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana transfer, dana desa, dan PAD terhadap indeks Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 4(3), 285-305.
- Sulaeman, A. S. dan Silvia, V. (2019). Pendapatan Asli Daerah, Transfer Daerah, dan Belanja Modal, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Akuntansi (JAA)*, volume 4 (1). DOI: <https://doi.org/10.29303/jaa.v4i1.61>.
- Susani, D., & Hanifa, N. (2026). The Effect of Regional Fiscal Capacity and Capital Expenditure on Economic Growth in Central Java Province. *Indonesian Journal of Development Economics EFFICIENT*, 9(1), 15-23.
- Teguh Alfharizqi, M. J. (2026). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (2015-2024). *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, 5(1), 44-50. <https://doi.org/10.47233/jemb.v5i1.4215>
- Utami, F. P., 2020. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan, Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, Vol. 4, No.2. September 2020.
- Wahyuni, R. (2020). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten di Jawa Timur*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wibowo, B. S. T. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Untuk Periode 2015-2024. *Oikos: Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan ...*, 4(3), 19096-19104. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/3394%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/download/3394/1844>